

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 03 TAHUN 1999
TENTANG
PENATAAN LOKASI USAHA DAN PEMBINAAN USAHA PKL
(STUDI KEEFEKTIFAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DITINJAU DARI POLA
INTERAKSI SUATU SISTEM KEBIJAKAN)**

SKRIPSI



MILIA
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Diajukan oleh :

SUTRISMIATI

NPM : 079615350

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Semester Gasal Tahun 2001 / 2002

**SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 03 TAHUN 1999
TENTANG
PENATAAN LOKASI USAHA DAN PEMBINAAN USAHA PKL
(STUDI KEEFEKTIFAN IMPLEMENTASI KEBUJAKAN DITINJAU DARI POLA
INTERAKSI SUATU SISTEM KEBUJAKAN)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat
dalam memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Diajukan oleh :

SUTRISMIATI

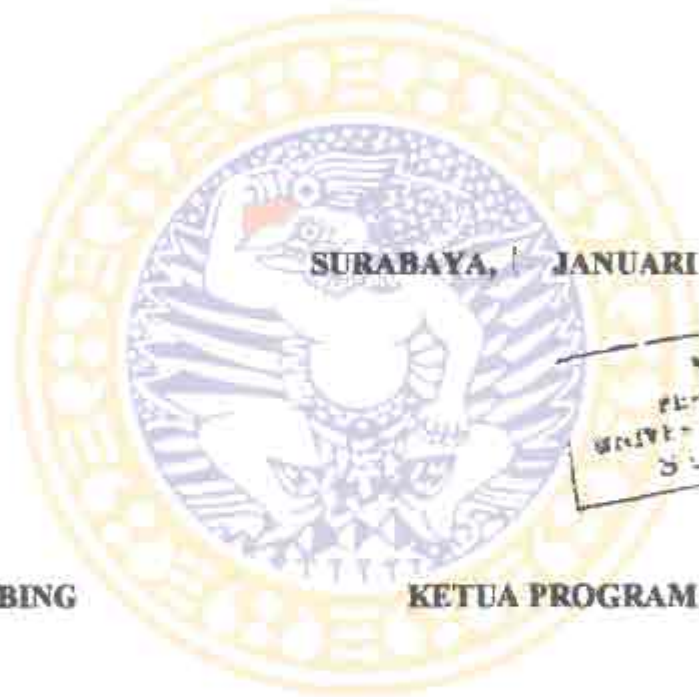
NPM : 079615350

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

Semester Gasal Tahun 2001 / 2002

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA BAIK UNTUK DISETUJUI DAN SIAP
DIUJIKAN



SURABAYA, | JANUARI 2002

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI

Drs. Gitadi Tegas S. Msi

Nip. 101 300 130 100

Drs. Gitadi Tegas S. Msi

Nip. 101 300 130 100

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga pada,

Hari : Senin

Tanggal : 28 Januari 2002

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : R. 250

Dewan Penguji terdiri dari :



Anggota

Drs. GITADI TEGAS S. MSi
NIP. 131 569 363

Anggota

Drs. GATOT PRAMUKA, MSi
NIP. 131 801 401

ABSTRAKSI

Salah satu problem penting yang dihadapi kota Surabaya adalah tumbuh pesatnya sektor informal pedagang kaki lima yang keberadaannya telah membawa dampak negatif pada ketertiban, kemacetan, kebersihan, serta keindahan kota karena lokasi yang dipergunakan untuk kegiatan adalah bukan diperuntukkan untuk usaha.

Pemerintah kota Surabaya banyak mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi problem tersebut dan banyak pula diadakan penelitian tentang implementasi kebijakan. Tetapi fokus penelitian ini adalah untuk menilai tingkat keefektifan pelaksanaan implementasi khususnya SK. No. 03 tahun 1999 tentang Penataan Lokasi Usaha dan Pembinaan Usaha PKL dilihat dari pola interaksi antar unsur-unsur atau komponen dalam sistem kebijakan yaitu unsur kebijakan SK. tersebut, unsur pelaku kebijakan yang terdiri dari aparat Birokrasi dan kelompok sasaran PKL dari PKL Binaan maupun Non Binaan dengan mengambil sampel di lokasi PKL Jl. Raya Nginden dan PKL Jl Tunjungan dengan penyebaran sejumlah kuisisioner pada PKL dan wawancara dengan aparat pelaksana.

Analisa penelitian ini didasarkan pada teori Inkremental Linblom untuk mencari jawab terhadap problem yang saat ini dihadapi juga disesuaikan dengan Teori sistem dan Teori Tiga Kesesuaian dari David C. Korten, dengan melaksanakan kajian mendalam pada 3 variabel pokok yaitu kebijakan penataan dan pembinaan PKL, pelaku kebijakan (aparat pelaksana dan kelompok sasaran) dan faktor lingkungan.

Besarnya nilai atau manfaat yang diperoleh PKL terhadap kebijakan merupakan indikator atau tolok ukur yang digunakan melihat keberhasilan atau keefektifan program. Semakin besar manfaat yang dirasakan PKL pada perkembangan usaha mereka, semakin tinggi tingkat partisipasi atau kerjasama mereka serta terpenuhinya tujuan kebijakan maka dapat dikatakan kebijakan pemerintah kota dalam menangani masalah pedagang kaki lima tersebut efektif. Sedangkan faktor pendidikan dan pengalaman, usia dan lama berprofesi sebagai pedang kaki lima digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketajaman persepsi dari PKL. Seberapa jauh mereka memahami kebijakan SK.No. 03 tahun 1999 dan atau seberapa besar reaksi mereka terhadap diberlakukannya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya.

Diketahuinya pendapat, keinginan dan harapan PKL memberi kemudahan decision maker atau pengambil keputusan untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah dari keberadaan PKL saat ini dan sekiranya sebagai patokan untuk mengambil keputusan kebijakan PKL untuk masa depan yang lebih efektif, efisien dan menguntungkan (mutualistik) bagi semua pihak, baik masyarakat dan pemerintah.